



SENIN, 29 OKTOBER 2018

SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

ASN Takut Jadi PPTK
Ratusan Miliar "Mubazir"

Sejumlah proyek tidak dimasukkan ke Unit Layanan Pengadaan (ULP). Aparatur Sipil Negara (ASN) takut menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Akibatnya pembangunan tersendat. Uang ratusan miliar "mubazir". Berikut Laporan Khusus (Lapsus) minggu ini.

PROYEK di Pemerintah Provinsi Bengkulu bisa dikatakan paling banyak yang bakal tidak dilelang dan dikerjakan tahun ini. Hingga tanggal 25 Oktober saja, jumlah paket yang belum masuk ke ULP oleh organisasi perangkat daerah (OPD) ada 111 paket. Nilainya pun fantastis Rp 121 miliar. Sedangkan yang masuk ke ULP 266 paket dengan nilai Rp 658 miliar dari total paket keseluruhan 377 paket dengan nilai Rp 779 miliar. Paket yang sudah selesai lelang 242, sementara yang masih dalam proses

8 paket, dalam persiapan 10 paket dan gagal lelang 6 paket.

Bukan hanya di Pemprov Bengkulu, sejumlah kabupaten juga hampir mengalami kondisi yang sama. Seperti di Seluma ada 25 paket proyek yang belum masuk ULP dengan nilai Rp 20,4 miliar (*Lengkapnya lihat grafis*).

Sambungan dari halaman 1

Belum lagi paket proyek gagal lelang. Tingginya paket yang tidak masuk ULP dan gagal itu selaras dengan jumlah PNS yang telah divonis bersalah dan berkekuatan hukum tetap melakukan tindak pidana korupsi. Seperti di Pemprov ada 43, sedangkan di Seluma ada 25.

Bila ditotalkan proyek yang gagal dan belum masuk ULP tersebut, sedikitnya Rp 160 miliar terancam "mubazir" tidak terserap. Baru bisa digunakan di APBDP tahun 2019. Pemerintah masih punya waktu di penghujung tahun ini.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Seluma, M. Saipullah, ST mengatakan ASN di PUPR banyak tidak mau terlibat dalam kegiatan fisik. Termasuk tahun depan. Jika Undang-undang mengatur ASN divonis bersalah dalam kasus korupsi harus dipecat tidak direvisi.

"Terus terang ASN PU tidak mau lagi dilibatkan dalam kegiatan fisik proyek, mereka sudah komitmen dan siap menerima sanksi apapun," kata M. Saipullah.

Dijelaskannya ASN sifatnya hanya menjalankan tugas sesuai administrasi yang ada. Sehingga, tidak semestinya dianggap sebagai pelaku korupsi. Selain itu tidak ada jaminan bagi ASN yang menjalankan tugas tersebut tidak akan terlibat jika proyek yang ditanganinya bermasalah, sehingga menjadi ASN tersebutlah yang menjadi korban. "Dari awal sudah ada pihak ketiga, ada kontraktor dan konsultan. Mengapa kita yang dianggap korupsi," kata M. Saipullah.

Ditambahkan M. Saipullah, PPTK berani menyatakan pekerjaan tersebut selesai setelah ada rekomendasi dari konsultan. Sementara tim teknis bekerja sesuai syarat administrasi. "Kita bukannya tidak mendukung penindakan pelaku korupsi. Tapi, jangan ASN yang jadi korban," ujarnya.

Sambungannya saat ini sudah 14 ASN PUPR terancam di pecat. Oleh karena itu dirinya sangat kewalahan jika rencana pemecatan itu benar terjadi. Sudah bisa dipastikan Dinas PUPR akan lumpuh karena kekurangan tenaga teknis yang telah memiliki pengalaman dalam menangani dan mengurus proyek.

"Saya harap ada pertimbanganlah, silakan disanksi tapi jangan dipecat. Mereka ini juga punya keluarga yang harus dinafkahi, bagaimana jadinya jika mereka benar dipecat," ucapnya.

Di Lebong, dari 95 paket pengadaan barang dan jasa pemerintah tahun anggaran 2018 senilai Rp 123 miliar di Kabupaten Lebong, paket yang berhasil dilelang hanya 87 paket dengan nilai 119 miliar. Dari jumlah itu Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Lebong berhasil menghemat anggaran sebesar Rp 4,1 miliar.

Sementara 8 paket lainnya senilai 3,08 miliar gagal lelang. Selain dipengaruhi ketidaksanggupan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis melaksanakannya lantaran banyak PNS yang tidak berani menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), juga karena adanya rencana pengalihan untuk pekerjaan lain. Paket yang tidak terlaksana itu, antara lain paket peningkatan hotmix jalan lingkungan Gang Purba dan samping PDAM Kelurahan Amen senilai Rp 500 juta oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan (PUPRHub).

Termasuk paket belanja modal pengendalian sarana dan prasarana kerja Sub PPKBD senilai Rp 421 juta oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB). Selanjutnya Dinkes Pengadaan Sarana Distribusi dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Farmasi sebesar Rp 423 miliar. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu paket pakaian seragam SD dan SMP dengan pagu Rp 800 juta.



SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

SENIN, 29 OKTOBER 2018

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

ASN Takut Jadi PPTK

Ratusan Miliar "Mubazir"

Termasuk paket belanja jasa konsultasi penyusunan dokumen UKL/UPL TPA Air Koprasi senilai Rp 110 juta di Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Lainnya, masterplan objek wisata Air Putih senilai Rp 380 juta di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora).

Terakhir, pengadaan server dan kelengkapan senilai Rp 450 juta di Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian (Diskominfo SP).

"Untuk delapan paket yang gagal lelang itu sudah beberapa kali kami usahakan dilelang, namun OPD nya tidak juga menyia-

kan berkas pra lelangnya. Ada yang terangan tidak sanggup melaksanakannya, ada juga yang sempat ingin mengalihkan dana itu untuk kegiatan lain," ujar Kabag Layanan Pengadaan Pemkab Lebong, Syarifuddin, S.Sos, M.Si.

3 Paket Gagal, Belasan ASN Terancam Dipecat

Di Pemda Bengkulu Selatan, dari total 65 paket lelang pada APBD Kabupaten BS 2018, 3 paket di Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) gagal dilaksanakan. Tiga proyek dengan nilai Rp 8 miliar merupakan program unggulan Bupati BS non aktif Dirwan Mahmud, sebelum tersandung kasus OTT KPK.

Ketiga proyek gagal tersebut, yaitu, pembangunan alun-alun Taman Merdeka, Balai Adat dan gedung Perpustakaan Daerah (Perpusda). Sementara 63 proyek lelang lainnya dengan total anggaran sekitar Rp 65,9 miliar berhasil dilelang. "Yang masuk ke ULP dan berhasil dilelang itu ada 62 paket dengan total nilai Rp 65,9 miliar," ujar Ketua ULP Kabupaten BS Hengky Perdana, ST.

Hengki sendiri mengaku tidak mengetahui penyebab pasti ketiga paket pada bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten BS itu batal dilaksanakan tahun ini. Mengingat pihaknya sama sekali belum menerima berkas lelang ketiga paket tersebut. "Berkasnya belum sama sekali masuk ke ULP dari PUPR," terangnya.

Dari Pemkab BS sendiri sebelum pembahasan APBD Perubahan dimulai sudah mulai mengevaluasi pembangunan 3 proyek ini. Lalu memutuskan tidak melanjutkan pembangunan dengan alasan sisa waktu tidak cukup lagi untuk pelaksanaan pembangunan. Belum lagi permasalahan aset yang harus dihapuskan terlebih dahulu mengingat lokasi pembangunan baru diatas aset lama.

"Alasan yang masuk ke DPRD saat kita klarifikasi, karena waktu. Asumsi PUPR dengan sisa waktu yang ada, pekerjaan fisik tidak akan selesai tepat waktu. Termasuk penghapusan aset juga membutuhkan waktu," kata Ketua DPRD BS Yevri Sudioanto ketika dikonfirmasi terkait penyebab gagalnya 3 paket PUPR.

Sementara itu di Kabupaten BS, ada belasan ASN mantan napi korupsi yang masih aktif terancam dipecat atas pemberlakuan Undang-Undang tahun 2014 tentang ASN dan PP Nomor 11 tahun 2017. Hal itu juga merupakan hasil koordinasi terakhir Pemkab BS dengan BKN. Dari BKN tidak ada lagi alasan bagi Pemkab untuk tidak memproses pemecatan ASN tersebut.

"Ada sekitar 12-14 ASN, jumlah persisnya saya lupa itu data di BKPSDM. Masih dalam pendataan yang sudah benar-benar inkrah tapi masih aktif," elak pj Sekda BS Yulian Fauzi saat ditanya jumlah ASN di lingkungan Pemkab BS mantan napi korupsi.

Kepahiang Nyaris Tuntas

Berbeda dengan Pemprov dan sejumlah daerah lain, ULP Kepahiang ini nyaris menuntaskan kinerjanya dalam melakukan pelayanan pengadaan baik barang maupun jasa di Kabupaten Kepahiang yang telah dialokasikan dalam APBD Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018.

Terbukti dari 90 peket lelang di tahun 2018 ini, sebanyak 89 paket yang sudah masuk ULP. Dari 89 paket tersebut sebanyak 85 paket sudah selesai lelang, sementara 1 paket masih persiapan lelang, 1 paket sedang da-

lam proses lelang dan 2 paket yang dinyatakan gagal lelang. *(selengkapnya lihat grafis)*

"Saat ini seluruh pekerjaan paket di APBD sudah hampir tuntas kita lakukan lelang. Dan yang terakhir yang sudah kita selesaikan adalah lelang kopi sambung untuk dua kecamatan," ungkap Kepala ULP Kabupaten Kepahiang Feri Irawan, ST.

Jangan Takut Intervensi

Sementara itu, masalah banyaknya paket kegiatan fisik di Pemprov Bengkulu yang tidak masuk ULP dan tidak mungkin lagi dilaksanakan yang diduga karena banyak PPTK ketakutan dikomentari juga oleh Pengamat Hukum Pidana, Prof.Dr. Herlambang, SH, MH. Ia khawatir yang menjadi alasan PPTK takut menjalankan proyek itu karena banyak proyek titipan.

Sehingga, menurut dia rasa keraguan atau ketakutan PNS yang ditunjuk jadi PPTK itu wajar. "Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya supaya pekerjaan dilaksanakan tapi PPTK aman, tidak masuk penjara. Yang pertama laksanakan pekerjaan itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kedua, jangan ikuti intervensi dari siapapun, walaupun misalnya PPTK sudah tahu bahwa proyek-proyek titipan," kata Herlambang.



SUMBER BERITA

SENIN, 29 OKTOBER 2018

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

ASN Takut Jadi PPTK

Ratusan Miliar “Mubazir”

Titipan siapa? Bisa jadi kata Herlambang ada proyek-proyek titipan, baik itu mungkin titipan oknum dewan (DPRD), titipan oknum petinggi PNS, oknum di ULP atau pihak-pihak lain. “Kalau sudah proyek titipan, sudah tahu siapa yang akan mengerjakan, itu namanya sudah mencari celaka sejak awal. Wajar kalau misalnya PPTK lebih memilih tidak melaksanakan pekerjaan itu,” ujar Herlambang.

Tapi sepanjang PPTK lakukan sesuai ketentuan yang berlaku, kemudian pelaksanaannya juga diawasi dengan benar oleh konsultan pengawas serta rutin konsultasi dengan pengawas termasuk aparat penegak hukum misalnya TP4D dari kejaksaan, Herlambang yakin semuanya akan aman.

“Tapi kalau proyek pesanan dan pemenangnya sudah ada sebelum lelang, nanti kualitas pekerjaan pasti tidak baik, saya jamin. Kalau terlalu banyak yang minta fee, uangnya jadi berkurang. Kalau uangnya berkurang, pekerjaan dipaksakan dan diakal-akali. Pasti akhirnya pekerjaan itu tidak akan sesuai dengan spek dan pasti akan ada temuan kerugian negara, kekurangan materi, kekurangan spek. Akhirnya PPTK itu yang pertama akan dilirik aparat,” terang Herlambang.

Namun dalam hal persoalan banyaknya paket di Pemprov yang belum terlaksana, Herlambang belum tahu apakah benar karena faktor PPTK ketakutan atau memang disengaja oleh OPD yang bersangkutan untuk menghambat pembangunan.

“Saya nggak tahu motif yang sebenarnya apakah mereka (PPTK) memang tidak berani, atau memang dia sudah tahu bakal banyak intervensi, maka dia memilih berkesimpulan tidak dilaksanakan. Saran saya janganlah minta-minta fee, buang pikiran kotor seperti itu. Kan TTP sudah besar. Sekarang mudah sekali APH mengungkap dan menangkap. Jadi hati-hati,” tukas Herlambang.

Terpisah, Sekda Provinsi Bengkulu H. Nopian Andusti, SE, MT minta semua PNS yang dapat jabatan sebagai PPTK dalam suatu proyek agar melaksanakannya sesuai aturan. Ia minta PPTK tidak usah takut atau ragu. “Aturan harus kita pahami dan ikuti betul. Jangan mau diintervensi oleh siapapun kecuali intervensi yang positif. Intervensi yang negatif jangan ikuti, siapapun itu. Sepanjang kita melaksanakan kegiatan sesuai dengan koridor aturan yang benar dan tidak menerima intervensi yang negatif, saya punya keyakinan kita akan selamat,” kata Nopian.

Ia juga menerangkan soal serapan anggaran yang ia akui masih rendah yakni sekitar 55 persen. Namun ke depan ia berharap tidak akan terulang lagi. Caranya? “Kita berharap ketika sudah ada persetujuan APBD antara gubernur dengan DPRD silakan langsung lelang. Cuma kontraknya ditandatangani setelah DPA nya diterbitkan. Kalau seperti ini, awal bulan sudah bisa tayang. Tapi kontrak tandingan tunggu dulu,

setelah uangnya telah dipastikan ada. Untuk yang tahun ini sudahlah, ini jadi pembelajaran kita. Saya berharap kawan-kawan media juga dukung kita bersama-sama bagaimana pembangunannya ini lebih lancar, lebih cepat dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Nopian sembari mengatakan bayangan besaran APBD 2019 sekitar 3,4 triliun lebih. (sca/aba/slv/kev/tew)